

Polisi Responsif Laporan Masyarakat

■ Tanggapi Pernyataan Walikota Sutarmidji

Pontianak, BERKAT.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Drs Suhadi SW menyatakan pihaknya tidak

sembarangan dalam memeriksa untuk disidik dan dilidik hal tersebut merupakan sikap responsif Kepolisian. Dan selalu ada bukti permulaan yang cukup, untuk ditindak lanjuti.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Walikota Pontianak Sutarmidji, SH, M.Hum yang mengatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya tidak memeriksa para Direksi PDAM berdasar laporan dari masyarakat. Dan polisi menurut Sutarmidji harus realistis.

Bahkan menurut Sutarmidji, permohonan pengunduran diri tiga Direksi PDAM (Dirtek, Dirum dan Dirut) disebabkan para Direksi tersebut tidak tahan selalu diperiksa Polisi.

"Kepolisian memanggil yang bersangkutan hanya dimintai keterangan, karena ada pelapornya dan juga memiliki bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Walaupun laporan tersebut, adalah laporan dari masyarakat," tegas Suhadi Rabu (26/1) di ruang kerjanya.

” Alasan pengunduran diri itu sudah tidak logis.

Tapi itu haknya, namun sikap demikian justru mempertebal praduga-praduga penegak hukum. ”

SAMPUR DONGAN S.

Pengamat Hukum

Lanjutnya lagi, atas dasar dari laporan tersebut langsung ditindak lanjuti apakah

LANJUTAN BACA HAL 11

Polisi Responsif Laporan Masyarakatdari Hal 1

benar mengenai laporan tersebut. "Sehingga kita panggil beberapa orang untuk diambil keterangannya itu yang kami crosscek," paparnya.

Hasil audit BPKP dan BPK, seperti yang disebutkan midji tidak ada permasalahan. Suhadi mengakui belum di cek. Yang jelas lanjut Suhadi, mereka telah memeriksa Direksi PDAM tersebut terkait masalah keuangan dugaan benar atau tidaknya pengelapan itu. "Dari sana bisa saja nantinya berkembang," ujar Suhadi.

Tambahnya lagi, untuk saksi tentu dilihat, dan ini masih dalam penyelidikan.

Sementara itu, Sampur Dongan Simamora pengamat Hukum Untan ini menyatakan alasan pengunduran diri itu sudah tidak logis. Tapi itu haknya, namun sikap demikian justru mempertebal praduga-praduga penegak hukum. "Pengunduran diri tidak melepaskannya dari jeratan hukum," tegas Dosen Fakultas Hukum Untan ini.

Sampur Dongan Simamora ini juga merasa heran apa ada hubungan mengundurkan diri dari jabatan dengan polisi, kalau ada tentu harus dilihat apa kaitannya dengan suatu kejahatan.

"Jika ya tentu saja polisi punya kewenangan untuk menyelidiki kebenarannya, terlepas dari atau tidak ada laporan. Kecuali, kalau kejahatan itu delik aduan," jelasnya.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Untan ini, sikap mau mengundurkan diri adalah salah satu sikap seorang ksatria. Dari pada, ada orang yang tidak mau mundur-mundur walau semua sudah menyuruh mundur.

"Menurut saya, yang penting mengapa mau mengundurkan diri. Tentu pak Midji sudah dapat memahaminya. Toh tergantung beliaulah keputusannya, dan penyebabnya tentu beraneka ragam. Mulai dari yang sederhana, sampai dengan ekstrim," pungkasnya. (jon)